

Implementasi Konsep Pawongan Dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Buleleng

Komang Heriyanti^{1}*

¹ Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja
E-mail Korespondensi: heriyantikomang@gmail.com

Keywords:	Abstract
<i>Buleleng, Harmony, Pawongan</i>	<i>Buleleng Regency is one of the regencies in Bali Province, where the people of Buleleng Regency not only consist of Hindus, but are also inhabited by other people. The existing differences do not make the community in Buleleng Regency divided into groups that only recognize their fellow communities. The reflection of religious harmony in Buleleng Regency is very clearly visible. The reason why harmony in Buleleng Regency can survive to this day is because the community applies the pawongan concept. The concept of pawongan was born from the thoughts of Balinese Hindus, in fact in Buleleng Regency it is not only applied by Hindus, but also by other people. This is because the concept of pawongan contains universal values. The harmony contained in the pawongan concept can apply to everyone regardless of religion. The implementation of the pawongan concept in Buleleng Regency can be seen from the activities of menyama braya in the community.</i>

Kata kunci:	Abstrak
Buleleng, Kerukunan, Pawongan	Kabupaten Buleleng merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Bali, dimana masyarakat Kabupaten Buleleng tidak saja terdiri dari umat Hindu, tetapi juga dihuni oleh umat lain. Perbedaan yang ada tidak menjadikan masyarakat di Kabupaten Buleleng terkotak-kotak yang hanya mengakui sesama komunitasnya saja. Cermin kerukunan umat beragama di Kabupaten Buleleng sangat jelas terlihat. Adapun alasan yang menyebabkan kerukunan di Kabupaten Buleleng dapat bertahan hingga saat ini karena masyarakat menerapkan konsep pawongan. Konsep pawongan yang lahir dari hasil pemikiran umat Hindu Bali, pada kenyataannya di Kabupaten Buleleng tidak hanya diterapkan oleh umat Hindu, tetapi juga oleh umat lain. Hal ini disebabkan karena konsep pawongan mengandung nilai universal. Keharmonisan yang tertuang dalam konsep pawongan dapat berlaku bagi setiap orang tanpa melihat agama. Adapun implementasi konsep pawongan di Kabupaten Buleleng terlihat dari kegiatan menyama braya dalam masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Ketidakrukunan atau konflik dalam kehidupan umat manusia memang sering terjadi, bahkan diantara kelompok dengan latar belakang yang sama. Konflik menjadi salah satu tantangan sosial di berbagai negara, termasuk di Indonesia yang memiliki keberagaman agama. Dalam beberapa kasus di Indonesia, konflik seringkali dikaitkan dengan masalah agama. Rahmat (2003) analisis mendalam menunjukkan bahwa agama seringkali hanya menjadi alat dalam memperkeruh konflik, sementara akar penyebabnya biasanya lebih kompleks. Jika dianalisis secara mendalam ada dua faktor utama yang menyebabkan konflik sosial, yaitu faktor ekonomi dan faktor politik. Faktor ekonomi mendorong manusia untuk berusaha memperoleh fasilitas kehidupan. Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat sementara persediaan kebutuhan hidup semakin langka dan terbatas, konflik sosial menjadi tidak terhindarkan. Begitu pula dengan faktor politik, dimana manusia membutuhkan dan memperebutkan ruang publik serta otoritas. Agama merupakan faktor sekunder yang dapat digunakan sebagai pemicu terjadinya konflik sosial.

Berdasarkan pendapat di atas, agama dalam kesempatan tertentu ditarik ke dalam sebuah konflik untuk kepentingan. Oleh karena itu, dalam kehidupan umat beragama seharusnya setiap orang membangun kesadaran bahwa perbedaan bukanlah sebagai arena kontestasi yang tidak sehat. Dengan demikian, maka kerukunan umat beragama tidak lagi merupakan objek pembicaraan secara teoritis belaka, tetapi sebagai sarana pembuka jalan terwujudnya kerukunan secara pragmatis.

Konflik umat beragama merupakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian pemerintah di Indonesia mengingat masyarakat Indonesia terdiri dari beragama agama. Begitupula dengan masyarakat di Kabupaten Buleleng. Meskipun Kabupaten Buleleng merupakan bagian dari Provinsi Bali yang terkenal dengan wilayah yang dihuni umat Hindu, akan tetapi pada kenyataannya Kabupaten Buleleng juga dihuni oleh umat non Hindu. Keberadaan umat non Hindu di Kabupaten Buleleng, tersebar di beberapa wilayah yang tidak saja di wilayah perkotaan, tetapi juga di wilayah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa kerukunan antarumat beragama sesungguhnya sudah berjalan semenjak dahulu.

Dibalik maraknya konflik antarumat beragama di Indonesia, tetapi masyarakat di Kabupaten Buleleng mampu mempertahankan nilai-nilai kerukunan yang telah lama berkembang di masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari konsep pawongan yang menjadi landasan orang Bali dalam bermasyarakat. Umat Hindu selaku masyarakat asli yang mendiami

Kabupaten Buleleng, memberikan contoh kepada umat lainnya dalam menerapkan konsep pawongan di masyarakat. Dengan berjalannya waktu nilai-nilai kerukunan yang ada dalam konsep pawongan tersebut, juga dapat diterapkan oleh umat lainnya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali mengapa konsep *pawongan* dapat menguatkan kerukunan masyarakat di Kabupaten Buleleng dan bagaimana bentuk implementasi konsep *pawongan* dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Buleleng.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Moleong (2007: 6) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk dapat memahami fenomena mengenai hal yang dialami oleh subjek penelitian contohnya ialah perilaku, persepsi, tindakan, motivasi secara holistik dan dengan cara dideskripsikan melalui kata-kata dan beragam bahasa, pada suatu konteks yang khusus dan alamiah. Dengan demikian penelitian ini menjelaskan fenomena di lapangan terkait peran konsep *pawongan* dalam merealisasikan kerukunan umat beragama, baik intern umat beragama maupun antarumat beragama di Kabupaten Buleleng. Dalam mengkaji permasalahan penelitian ini, menggunakan teori fungsionalisme struktural. Teori fungsional struktural membahas terkait perilaku manusia dalam suatu organisasi masyarakat dan bagaimana perilaku tersebut berada dan dapat mempertahankan suatu keseimbangan dalam suatu organisasi masyarakat (Haryanto, 2014: 4). Teori fungsional struktural digunakan dengan asumsi bahwa kerukunan di masyarakat dapat terealisasi ketika setiap struktur di masyarakat mampu memahami dan menerapkan konsep *pawongan* dalam kehidupan sosial. Dengan demikian setiap struktur berfungsi bagi struktur yang lain. Berkaitan dengan metode pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode observasi dan studi dokumen. Observasi dilakukan dengan melihat bentuk implementasi konsep *pawongan* dalam menjaga kerukunan di masyarakat. Selain itu, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian juga dipelajari dengan teliti, sehingga mendukung untuk kelengkapan data

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Alasan Konsep *Pawongan* Dapat Membangun Kerukunan Sosial Di Kabupaten Buleleng

Pawongan bukan hanya sebuah konsep yang hanya dapat diterapkan oleh sesama umat Hindu Bali, tetapi *pawongan* juga sebagai pedoman hidup bersama yang menjunjung tinggi toleransi dan solidaritas. Nilai-nilai dalam *pawongan* melampaui batas agama tertentu, sehingga mampu mengakomodasi keberagaman keyakinan yang ada di Kabupaten Buleleng. Dengan *pawongan*, umat beragama di Kabupaten Buleleng, diajak untuk fokus pada keharmonisan, sehingga perbedaan agama tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan untuk menghadapi tantangan bersama. Runa (2012) *pawongan* merupakan bagian integral dari konsep *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* adalah konsep yang mengharmonisasikan hubungan manusia dengan Tuhan (*Parhyangan*), hubungan antar manusia (*Pawongan*), dan hubungan manusia dengan alam dan lingkungan sekitarnya (*Palemahan*).

Sesuai pendapat di atas, *pawongan* merupakan konsep kerukunan yang termuat dalam *Tri Hita Karana*. *Pawongan* sesuai dengan pengertiannya yaitu menjaga hubungan antara manusia dengan manusia, sangat jelas mengandung nilai universal. Setiap manusia patut dihormati tanpa memandang suku, agama, bahkan budaya. Dengan demikian *pawongan* menjadi konsep penting yang diimplementasikan oleh masyarakat di Kabupaten Buleleng karena Buleleng merupakan wilayah yang dihuni penduduk yang beragam. Konflik bisa saja terjadi dalam wilayah yang penduduknya beragam atau heterogen. Maka dari itu pengamalan ajaran agama yang bernilai kerukunan perlu dipahami dan diimplementasikan.

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa alasan yang menyebabkan konsep *pawongan* dapat membangun kerukunan sosial di Kabupaten Buleleng karena konsep *pawongan* mendorong setiap individu untuk menghormati keyakinan, tradisi, dan praktik agama orang lain. Dengan sikap saling menghormati, konflik yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan dapat diminimalkan. Selain itu konsep *pawongan* dapat dijadikan dasar oleh umat beragama di Kabupaten Buleleng untuk dapat bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kemanusiaan, pendidikan, atau kegiatan sosial, tanpa terhambat oleh perbedaan agama.

Sesuai pendapat di atas, ada beberapa alasan yang menyebabkan konsep *pawongan* tetap ajeg dan masih diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Buleleng. Konsep *pawongan* tidak saja diterapkan oleh umat sesama Hindu, tetapi antara umat Hindu dengan umat lainnya seperti umat Islam, Kristen, Konghucu, dan Buddha. Ini menandakan bahwa *pawongan* sebagai konsep yang lahir dari pemikiran umat Hindu telah mampu membawa kerukunan pada masyarakat di Kabupaten Buleleng.

Sepanjang sejarah manusia, interaksi antara individu atau antara kelompok masyarakat yang berbeda terjadi secara berkelanjutan. Interaksi ini merupakan bagian dari kodrat manusiawi yang menjadikan manusia sebagai makhluk sosial, dengan semua pengalaman yang menyertainya. Manusia sebagai makhluk sosial, tentu membutuhkan kehidupan bermasyarakat untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Setiap individu memerlukan dua konteks sosial, yaitu keluarga (kelompok kecil) dan pengalaman sebagai anggota dari kelompok besar. Namun, dalam interaksi tersebut, tidak dapat dihindari bahwa perbedaan-perbedaan sering kali muncul, yang kadang-kadang berujung pada perselisihan dengan konsekuensi yang merusak. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami arti kerukunan yang diajarkan oleh agama dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, tentu kita akan menemukan keberagaman berkaitan hal-hal tertentu. Keberagaman itu harus dihadapi dengan sebuah kesadaran pluralisme. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Buleleng.

Hasil wawancara menjelaskan bahwa *pawongan* sebagai ajaran dalam agama Hindu telah mampu menjadi pijakan bagi masyarakat Hindu di Kabupaten Buleleng untuk mengembangkan sikap toleransi kepada umat lain. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya bangunan-bangunan suci bagi umat lain seperti Masjid, Gereja, Kelenteng, dan Wihara. Selain itu, di Kabupaten Buleleng juga ada banyak pura yang menggambarkan adanya akulturasi budaya Hindu dengan budaya agama lain. Hal ini menjadi bukti bahwa bagaimana nilai-nilai *pawongan* dapat hidup dalam pemikiran dan sikap masyarakat di Kabupaten Buleleng.

Hal di atas sejalan dengan pernyataan Said (2012) bahwa kesadaran akan keberagaman adalah kunci penting yang harus diterima dan dihadapi dengan proporsional dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tantangannya tidak ringan, namun kesadaran ini bukanlah hal yang terlalu sulit untuk diwujudkan asalkan ada niat yang tulus untuk mencapainya. Kesadaran ini mensyaratkan bahwa kita bersedia menerima berbagai macam perbedaan. Berdasarkan pernyataan tersebut, kesadaran akan keberagaman bukan selalu menjadi hal yang sulit bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng, karena kesadaran akan keberagaman akan muncul apabila dilatih di dalam diri. Berkaitan dengan keragaman dalam keyakinan, walaupun semuanya mengalir dari sumber yang satu dan sama, ternyata dalam banyak hal kita belum sepakat. Masih ada upaya untuk menempatkan perbedaan keyakinan sebagai sebuah hambatan yang akhirnya mempengaruhi relasi satu sama lain. Bahkan keyakinan yang berbeda mempunyai daya pengaruh yang lebih luas dalam tatanan kehidupan sosial daripada perbedaan suku. Disamping itu sikap intoleran juga masih tampak dalam menyikapi kelompok minoritas dan juga dalam

menyikapi keyakinan yang sedikit berbeda. Penolakan akan perbedaan ini bahkan menjadi sangat ironis dibandingkan dengan misi agama yang selalu mengedepankan persaudaraan, perdamaian dan keadilan seperti misi yang tertuang dalam konsep *pawongan*. Akan tetapi berbeda halnya dengan fenomena umat beragama di Kabupaten Buleleng yang mampu berdampingan secara harmonis dalam perbedaan.

Pawongan dalam praktiknya selalu mengakui bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain. Masyarakat Bali yang beragam sangat menekankan keharmonisan sebagai implementasi dari ajaran pawongan. Agama Hindu, dalam ajarannya, menekankan pentingnya menjaga lingkungan yang harmonis, sehingga hubungan antar manusia perlu dijaga agar tetap harmonis (Sastrawan & Giri, 2023). *Pawongan* merupakan misi perdamaian yang tertuang dalam *Tri Hita Karana*. *Pawongan* memayungi keharmonisan dalam hubungan antarumat manusia. Dengan demikian *pawongan* merupakan konsep yang bersifat universal. Disebut universal karena memiliki ide, prinsip, atau gagasan yang berlaku secara umum dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, situasi, atau budaya. Konsep *pawongan* mendorong masyarakat untuk hidup dalam harmoni dan saling mendukung satu sama lain, yang pada gilirannya membantu menciptakan lingkungan yang damai dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan penjelasan Wiana (2007: 78) kekuatan manusia terletak dalam kemampuannya untuk bersama-sama menyatukan potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap individu dalam kehidupannya. Kebersamaan ini tidak hanya menciptakan harmoni, tetapi juga membawa kebahagiaan, sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran *Tri Hita Karana*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka manusia akan merasakan kebahagiaan sebagaimana yang diajarkan oleh *Tri Hita Karana* apabila mereka dapat berbagi suka dan duka dalam kehidupan bersama. Konsep *pawongan* dalam falsafah *Tri Hita Karana*, khususnya di Bali, telah membuktikan bahwa kerukunan dapat terwujud dengan baik dan telah terbukti dalam sejarah. Sistem nilai yang terkandung dalam *pawongan* bersifat universal karena semua kelompok komunitas terutama umat Hindu di Bali mengakuinya sebagai sesuatu yang berharga dan penting untuk diwujudkan. Menurut Astiti (2019: 273) *pawongan* adalah istilah yang mencerminkan hubungan yang positif antara individu-individu manusia. Dalam konteks ini, hubungan sosial yang baik diantara mereka dapat membawa keharmonisan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pendapat tersebut, *pawongan* merupakan gambaran kehidupan yang harmonis. Untuk menuju hubungan harmonis diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk saling mengerti dan saling memahami eksistensi masing-masing. Saling pengertian merupakan

modal penting dalam membina persatuan dan kesatuan. Kerukunan akan terus berjalan apabila setiap orang memiliki sikap toleransi. Usman (2023: 123) menjelaskan bahwa untuk menciptakan toleransi, diperlukan setidaknya dua modal sosial. Modal pertama adalah interaksi sosial melalui percakapan dan pergaulan yang intensif, dimana setiap kelompok harus diperlakukan dengan adil dan setara dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan agama. Modal kedua adalah membangun kepercayaan diantara berbagai kelompok, serta menumbuhkan semangat kesatuan yang berlandaskan pada prinsip kebangsaan.

Berdasarkan pendapat di atas, semua pihak seharusnya menjaga sikap toleransi dan memberikan dukungan agar kerukunan dapat terjaga, bukan sebaliknya menciptakan konflik yang dapat merusak kerukunan. Kerukunan adalah cermin dari ketaatan terhadap ajaran agama. Untuk menjaga aplikasi dan apresiasi terhadap kerukunan, penting bagi setiap institusi keagamaan untuk bekerja sama dengan semua pihak, dengan tujuan membangun mental dan spiritual umatnya sebaik mungkin. Pembangunan mental dan spiritual ini harus dimulai sejak usia dini hingga dewasa. Materi yang diajarkan haruslah ajaran yang mampu menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang baik.

Hal di atas sejalan dengan penjelasan Widiyastuti (2010: 1) akhlak dan budi pekerti memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, yang membedakan mereka sebagai makhluk yang superior dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dengan memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik, manusia mengatur perilaku dan tindakannya untuk selalu menuju kepada hal-hal yang mulia dan positif. Kehidupan di bumi ini bisa menjadi tidak teratur jika tidak ada akhlak dan budi pekerti yang baik.

Mental spiritual umat beragama yang memiliki budi pekerti yang luhur merupakan tujuan utama dari semua ajaran agama. Budi pekerti yang luhur mencerminkan kebijaksanaan suatu bangsa yang beradab. Tingkat peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari bagaimana mereka membangun dan menjaga masyarakat mereka agar tetap menghormati nilai-nilai budi pekerti yang tinggi. Meskipun mencapai tingkat ini sangatlah sulit, namun proses ini harus dimulai dari lembaga keagamaan dan kesadaran individu masing-masing umat, dimulai sejak usia dini dan diteruskan secara berkelanjutan. Langkah-langkah ini dapat diimplementasikan melalui tradisi pendidikan dan upaya mempertahankan tradisi kerukunan yang telah ada. Media untuk membangun budi pekerti yang baik sebaiknya dimulai dari para pemimpin agama, dengan dukungan dari keluarga dan masyarakat. Budi pekerti yang mulia ini menjadi harapan dan solusi untuk memelihara kerukunan umat beragama yang memegang teguh kesucian

agamanya. Dengan demikian, pengembangan budi pekerti diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan di mana masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai.

Bangsa Indonesia memiliki semboyan atau filosofi dasar yang membawa persatuan, yaitu Bhineka Tunggal Ika. Filosofi ini merupakan kekayaan yang dapat menyatukan berbagai latar belakang dan masyarakat Indonesia. Sebagai bagian dari empat pilar kebangsaan, filosofi ini mengikat perbedaan suku, bangsa, daerah, dan golongan. Oleh karena itu, nilai perjuangan dan semangat nasionalisme sangat kuat dalam filosofi ini (Setyobekti et al., 2021). Kerukunan yang terkandung dalam filosofi Bhineka Tunggal Ika menjadi tanpa arti jika tidak diaktualisasikan dalam wujud nyata lebih-lebih didalam keragaman kehidupan beragama. Tujuan kerukunan antarumat beragama tidaklah berhenti pada tataran pencapaian saja, akan tetapi juga bagaimana merealisasikan dan memeliharanya. Karena tujuan yang ingin dicapai adalah tujuan bersama antar umat beragama, maka semua kewajiban untuk mencapai tujuan tersebut berada di tangan umat tersebut sendiri.

Selain memerlukan kesadaran dalam diri pribadi setiap umat dalam membangun kerukunan, peran pemerintah formal seperti di tingkat desa sangat diperlukan. Hal itu disebabkan karena pemerintah di tingkat desa adalah yang lebih memahami kondisi masyarakatnya terlebih desa yang dihuni oleh masyarakat berbeda agama. Aparat desa melalui berbagai kesempatan selalu mengusahakan terciptanya suasana kondusif dalam rangka menjaga dan memelihara kerukunan antarumat beragama. Disadari pula bahwa memelihara kerukunan antarumat yang berbeda memerlukan tindakan yang penuh hati-hati, sebab agama mempunyai sensitifitas yang cukup tinggi dan sangat riskan. Beberapa tindakan nyata yang dapat dilakukan secara sinergis antara aparat desa dengan komponen masyarakat untuk mempertahankan integritas kerukunan antarumat beragama misalnya dengan memberikan berbagai penyuluhan, pembinaan secara kontinyu kepada warga masyarakat berkenaan dengan tata cara hidup bermasyarakat dan beragama yang baik tanpa melanggar norma-norma agama yang dianut oleh semua pihak.

2. Implementasi *Pawongan* dalam Budaya *Menyama Braya* di Kabupaten Buleleng

Istilah "*menyama braya*" berasal dari gabungan kata "*nyama*" yang artinya saudara, dan "*braya*" yang merujuk kepada semua orang sebagai tetangga terdekat atau sesama umat manusia yang satu jalur kelahiran horizontal. Konsep ini menekankan bahwa semua manusia adalah saudara dan mendorong untuk memperlakukan orang lain dengan kasih seperti kita memperlakukan saudara sendiri (Wisnumurti dalam Fatmawati, 2021).

Nilai kearifan lokal "*menyama braya*" mencerminkan konsep persamaan, persaudaraan, dan pengakuan sosial bahwa kita semua adalah satu keluarga besar. Hal ini merupakan salah satu implementasi dari konsep *pawongan*. Sebagai komunitas yang bersatu dalam persaudaraan sosial, penting bagi kita untuk melihat sesama sebagai saudara, mendukung satu sama lain baik dalam kegembiraan maupun kesedihan. Namun, dalam kondisi saat ini, ada kekhawatiran terhadap pergeseran nilai "*menyama braya*" di kalangan generasi muda. Hal ini disebabkan kurangnya bimbingan dan arahan yang diberikan oleh orang tua kepada generasi muda, sehingga mereka kehilangan arah dan pemahaman tentang nilai-nilai tersebut. Hal ini menyebabkan aplikasi *menyama braya* zaman dulu dengan yang sekarang telah mengalami perubahan.

Hasil wawancara dengan masyarakat menjelaskan bahwa implementasi konsep *pawongan* dalam budaya *menyama braya* di Kabupaten Buleleng dapat dilihat dari kegiatan *ngejot*. *Ngejot* sebagai istilah populer dalam kehidupan umat Hindu Bali, di Kabupaten Buleleng juga merupakan istilah yang populer bagi umat non Hindu. Adapun kegiatan *ngejot* biasanya dilakukan pada saat hari keagamaan. Misalnya pada saat hari raya Hindu seperti Galungan, maka warga Hindu *ngejot* jajanan kepada warga non Hindu. Begitu pula sebaliknya ketika ada perayaan Idul Fitri, Natal, dan Imlek maka umat lain yang *ngejot* kepada umat Hindu.

Berdasarkan wawancara di atas, wujud *menyama braya* antarumat beragama di Kabupaten Buleleng adalah melalui kegiatan *ngejot*. Tradisi *ngejot* di Kabupaten Buleleng adalah wujud nyata bagaimana budaya lokal dapat menjadi perekat sosial di tengah keberagaman agama. Dengan semangat berbagi, *ngejot* menciptakan harmoni, menguatkan toleransi, dan menjaga persatuan masyarakat di Kabupaten Buleleng. Tradisi *ngejot* tidak hanya mempererat hubungan antarumat beragama, tetapi juga menjadi contoh praktik toleransi yang dapat diterapkan di berbagai daerah lain.

Agama sering dianggap sebagai determinasi mengandung kemungkinan yang menyebabkan terjadinya konflik. Karena itu, disinilah peran konsep kerukunan seperti *pawongan* sangat dibutuhkan untuk sesegera mungkin dapat menetralsir situasi-situasi konflik yang mungkin saja terjadi didalam sebuah dinamika pergaulan. Karena itulah ajaran kerukunan yang ada dalam agama seperti dalam kitab suci Veda perlu untuk disebarkan kepada setiap umat Hindu. Salah satu ajaran kerukunan yang termuat dalam kitab suci Veda yaitu sebagai berikut:

samjñānam naḥ svebhiḥ.

samjñānam araṇebhih.

Samjñānam aśvinā yuvam

Ihāsmāsu ni 'acchatam.

(*Atharvaveda*, VII.12.1)

Terjemahan:

Semoga kami memiliki kerukunan yang sama dengan orang-orang yang sudah dikenal dengan akrab dan dengan orang-orang yang asing. Ya, para dewa Asvin, semoga Engkau kedua-duanya memberkahi kami dengan keserasian (keharmonisan) (Titib, 1996: 347).

Mantra *Atharvaveda* diatas memiliki nilai yang sangat universal bagi kehidupan semua makhluk di dunia ini. Semua makhluk mendambakan persatuan, keharmonisan demi kelangsungan hidupnya. Apabila manusia di dunia ini semuanya berpikir serta mempraktekkan ajaran Veda tersebut, maka setiap orang akan dapat mencapai *jagadhita* yaitu kebahagiaan lahir batin di dunia ini secara bersama-sama. Dengan melihat mantra Veda tersebut, sudah sangat jelas bahwa pesan-pesan kerukunan sudah ada dari semenjak Veda diturunkan. Pesan-pesan Veda merupakan bagian penting dalam kehidupan beragama umat Hindu dimanapun berada, terlebih khususnya bagi umat Hindu Bali. Nilai-nilai Veda di atas tercermin dalam konsep *pawongan* yang diimplemetasikan dalam kegiatan *menyama braya*.

Sugira (dalam Damayana 2011: 148) menjelaskan bahwa sejak sekitar 500 tahun yang lalu, saat Bali diperintah oleh kerajaan Gelgel di bawah kepemimpinan Dalem Waturenggong, konsep "*menyama braya*" mulai dikenal. Dalem Waturenggong memperkenalkan dan menyebarkan cara hidup ini di seluruh Bali, termasuk sampai ke Sumbawa dan Lombok. Tujuannya adalah untuk memelihara keharmonisan di tengah masyarakat yang beragam terutama dalam konteks perbedaan antara Bali, Budha, dan Islam.

Berdasarkan wawancara lebih lanjut dijelaskan bahwa *menyama braya* antarumat beragama di Kabupaten Buleleng dapat dilihat saat masyarakat dari berbagai latar belakang bersama-sama membersihkan lingkungan, mereka saling berinteraksi, berbicara, dan bekerja sama. Hal ini memperkuat rasa persaudaraan dan keharmonisan dalam masyarakat. jelas dalam hal ini gotong royong menunjukkan kepedulian terhadap tempat tinggal bersama. Lingkungan yang bersih mencerminkan rasa tanggung jawab bersama sebagai bagian dari komunitas.

Berdasarkan wawancara tersebut gotong royong membersihkan lingkungan merupakan wujud *menyama braya* di Kabupaten Buleleng, bukan hanya tentang kebersihan fisik, tetapi juga tentang memperkuat ikatan sosial dan toleransi di masyarakat. Kegiatan gotong royong

mencerminkan nilai luhur yang mengutamakan persatuan, kepedulian, dan tanggung jawab bersama dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan.

Konsep *menyama braya*, memunculkan sebutan identitas seperti *nyama* Bali untuk saudara-saudara di Bali, *nyama* Cina untuk saudara-saudara dari keturunan Cina, *nyama* Selam untuk saudara-saudara dari agama Islam, *nyama* Buda untuk saudara-saudara dari agama Budha, dan *nyama* Kristen untuk saudara-saudara dari agama Kristen. Konsep ini menekankan persaudaraan dan penghormatan antarindividu dari berbagai latar belakang keagamaan dan etnis dalam masyarakat Bali (Setia, 2002: 89; Soethama, 2006: 2005).

Konsep *menyama braya* sangat terkait dengan semua aspek kehidupan masyarakat Bali, baik dalam upacara keagamaan maupun kegiatan sehari-hari seperti gotong royong membersihkan desa, membangun rumah, serta dalam peristiwa suka dan duka seperti pernikahan, pemberian nama, dan kematian. Dalam semua kegiatan tersebut, partisipasi melibatkan berbagai lapisan masyarakat yang berbeda. Keterlibatan ini memperkuat perasaan identitas sebagai warga Bali yang sangat kuat dan mendalam (Damayana, 2011: 149). Masyarakat Bali mengenal istilah *menyama braya* dalam harmoni dengan sesama. *Menyama braya* mengacu pada hubungan atau relasi sosial-budaya sehari-hari antar masyarakat. Konsep ini umumnya diimplementasikan dalam bentuk saling membantu dan bekerja sama misalnya pada saat salah satu warga dalam masyarakat memiliki acara seperti pernikahan, kedukaan dan perayaan hari-hari besar keagamaan. Hal ini sejalan dengan penjelasan Fatmawati (2021) konsep *menyama braya* di Bali dapat diamati dalam tindakan gotong royong saat menyelenggarakan berbagai jenis upacara, baik yang bersifat keagamaan seperti upacara *dewa yadnya* maupun yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Selain itu, prinsip ini juga terlihat dalam praktik umat Hindu saling membesuk ketika ada saudara atau tetangga yang sakit. Tindakan membesuk ini mencerminkan ajaran *Tat Tvam Asi* dalam Hinduisme, yang menyatakan bahwa kita semua adalah satu dalam persaudaraan universal.

Cara hidup *menyama braya* dapat dengan mudah ditemui di masyarakat Bali, yang didasarkan pada keyakinan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan hidup dapat dicapai melalui hubungan harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitar. Sebagai contoh, dalam berbagai acara sukacita maupun kesedihan, orang-orang secara sukarela terlibat tanpa perlu ada perintah formal. Pada hari raya keagamaan, masyarakat sering saling bersilaturahmi, memberi selamat, dan mengantarkan makanan kepada saudara-saudara mereka yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda (Damayana, 2011: 104).

Berdasarkan pendapat di atas, dewasa ini *menyama braya* yang diwujudkan dengan silaturahmi bukan saja ditujukan kepada sesama orang Bali penganut Hindu. Sama halnya dengan masyarakat di Kabupaten Buleleng. Mengingat Kabupaten Buleleng juga didiami oleh umat non Hindu maka penerapan *menyama braya* juga terjadi antara umat Hindu dan non Hindu. Umat Hindu di Kabupaten Buleleng yang meyakini falsafah *Tri Hita Karana*, tentu menjadikan falsafah tersebut sebagai pedoman dalam aktivitas keagamaan dan pedoman hidup. Begitu juga dalam hubungan dengan sesama, maka konsep *pawongan* sebagai bagian dari *Tri Hita Karana* dijadikan landasan dalam bermasyarakat di Kabupaten Buleleng.

Tradisi *menyama braya* dapat dihidupkan jika setiap umat beragama mengedepankan kesadaran akan pentingnya tradisi ini dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Fajriyah (2017) *menyama braya* mencerminkan budaya damai yang menjadi modal sosial bagi masyarakat Bali dalam membangun ketahanan terhadap konflik. Oleh karena itu, semangat *menyama braya* sebaiknya dilakukan dengan niat yang tulus, bukan karena keterpaksaan. Penting untuk mengadakan dialog-dialog yang bertujuan untuk mengurangi kecurigaan, kesalahpahaman, dan egoisme kelompok, sehingga tradisi *menyama braya* dapat terus berlangsung dalam masyarakat. Kecurigaan seringkali menjadi penyebab utama kegagalan dalam upaya mempertahankan tradisi ini di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Jika perasaan curiga dan egoisme masih ada dalam kelompok, tradisi *menyama braya* akan mengalami pelunturan bahkan mungkin tidak lagi dipraktikkan oleh generasi muda. Oleh karena itu, sangat penting untuk secara intens memperkenalkan dan melestarikan tradisi *menyama braya* kepada generasi penerus, agar nilai-nilai kearifan lokal ini tetap terjaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan tradisi *menyama braya* di Kabupaten Buleleng adalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan yang plural saat ini, karena dengan dilaksanakan tradisi ini, maka kehidupan yang tentram, aman dan damai akan dapat terwujud. Namun tidak dipungkiri bahwa apa yang sudah menjadi tradisi ini lambatlaun akan tergerus dengan pola kehidupan yang liberalis, egois, dan individualis. Oleh karena itu sangat penting untuk melakukan upaya pelestarian pelaksanaan tradisi *menyama braya*, agar konflik-konflik yang mungkin timbul dapat dicegah sejak dini.

IV. SIMPULAN

Pawongan sebagai konsep yang tertuang dalam agama Hindu bukan saja berlaku bagi sesama umat Hindu. Bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng, konsep *pawongan*

diimplementasikan baik sesama umat Hindu maupun dengan umat non Hindu. Mengingat Kabupaten Buleleng merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat beragama agama, maka konsep pawongan dapat dijadikan pegangan oleh masyarakat. Adapun alasan konsep pawongan masih tetap diimplementasikan oleh masyarakat di Kabupaten Buleleng karena konsep pawongan mengandung dan mengajarkan nilai-nilai kebersamaan yang universal, dimana konsep pawongan dapat berlaku bagi setiap orang.

Adapun bentuk implementasi konsep pawongan dapat dilihat dalam budaya *menyama braya* seperti kegiatan *ngejot* pada saat hari-hari keagamaan. Baik hari keagamaan umat Hindu maupun hari keagamaan umat non Hindu. Selain kegiatan *ngejot*, implementasi konsep pawongan juga dapat dilihat dari kegiatan pembersihan lingkungan. Masyarakat dari berbeda agama secara bersama-sama menjaga lingkungan sebagai tempat mereka tinggal. Dalam hal ini *menyama braya* merupakan nilai kearifan lokal yang bersumber dari sistem nilai budaya dan tradisi adat untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Konsep *menyama braya* mendorong solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayana, I. W. (2011). *Menyama braya (Studi Perubahan Masyarakat Bali)* (Doctoral dissertation, Fakultas Teologi UKSW).
- Fajriyah, I. (2017). Pembangunan Perdamaian dan Harmoni Sosial di Bali Melalui Kearifan Lokal Menyama Braya. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, 3(1).
- Fatmawati, K. (2021). Menyama Braya dalam Upanisad. *JAPAM (Jurnal Pendidikan Agama)*, 1(01), 62-67.
- Haryanto, S. 2014. *Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Postmodern*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Moleong, Lexy. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Rahmat, M. I. (2003). *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas*. Erlangga.
- Runa, I. (2012). Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana untuk Kegiatan Ekowisata. *JURNAL KAJIAN BALI (JOURNAL OF BALI STUDIES)*, 2(1).
- Said, N. (2012). *Merawat Persaudaraan Sejati di atas Keragaman Agama*. Alauddin University Press.
- Sastrawan, K. B., & Giri, I. M. A. (2023). Pawongan Sebagai Konsep Multikultur Dalam Ajaran Agama Hindu Di Bali. *Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya*, 7(1), 9-14.

Setia, Putu. 2002. *Mendebat Bali*. Denpasar: Pustaka Manikgeni.

Setyobekti, A. B., Kathryn, S., & Sumen, S. (2021). Implementasi Nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika dalam Membingkai Keberagaman Pejabat Gereja Bethel Indonesia di DKI Jakarta. *SOTIRIA (Jurnal Theologia Dan Pendidikan Agama Kristen)*, 4(1), 1– 10. <https://doi.org/10.47166/sot.v4i1.29>.

Soethama, Gede Aryantha. 2006. *Bolak Balik Bali*. Denpasar: Arti Foundation.

Titib, I Made. 1996. *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*. Paramita: Surabaya.

Usman, I. (2023). Islam, Toleransi dan Kerukunan Umat Antar Beragama. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 117-132.

Wiana, I Ketut. 2007. *Tri Hita Karana Menurut Konsep Hindu*. Surabaya: Paramita.

Widiyastuti, Retno. 2010. *Kebaikan Akhlak dan Budi Pekerti*. Semarang: ALPRIN